

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN** **KOTA TEGAL TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka penyelesaian studi strata S1 untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal**

**Oleh :**

**MARTCHELLA EKA SYAFIERA**

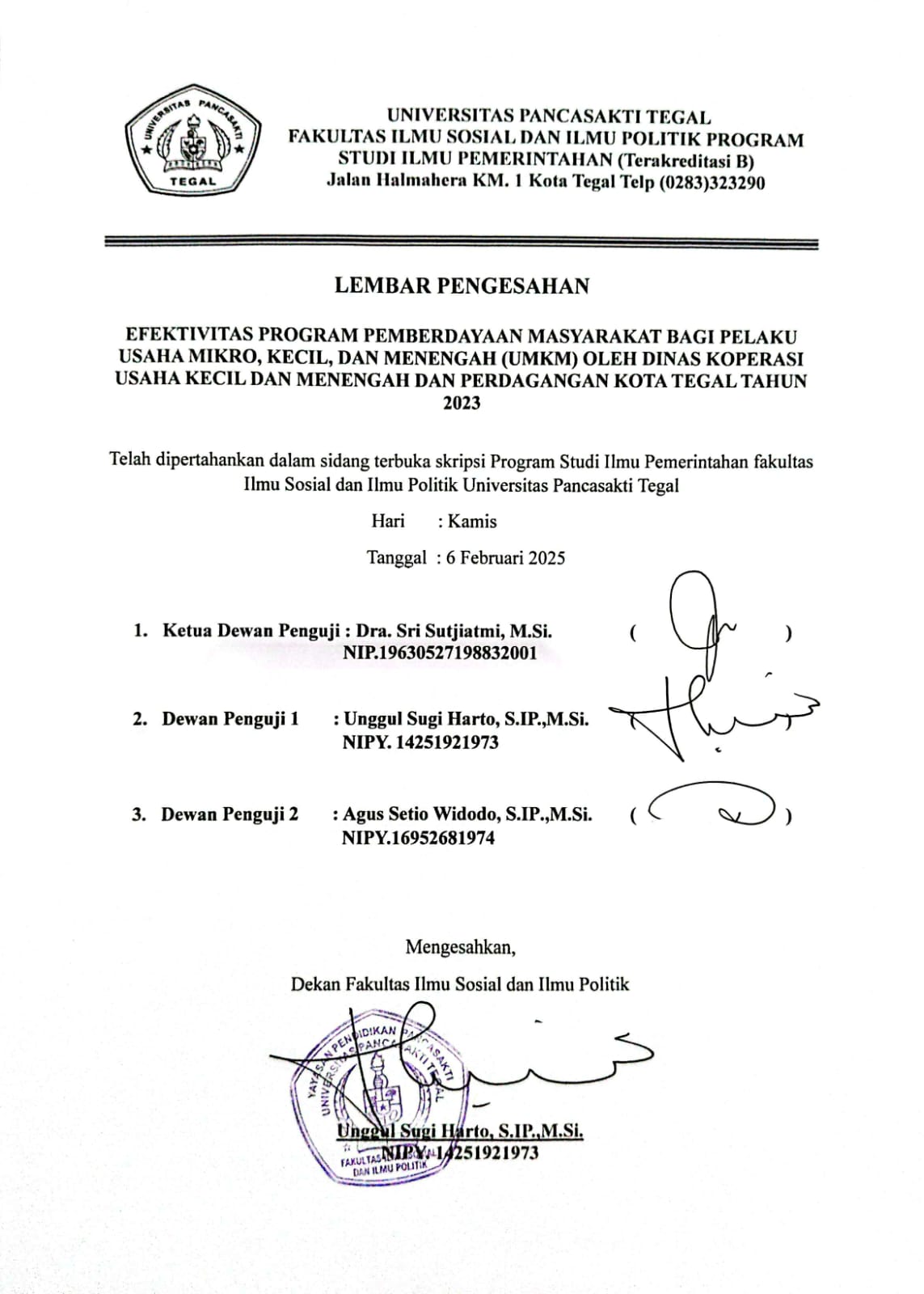
**NPM. 2119500072**

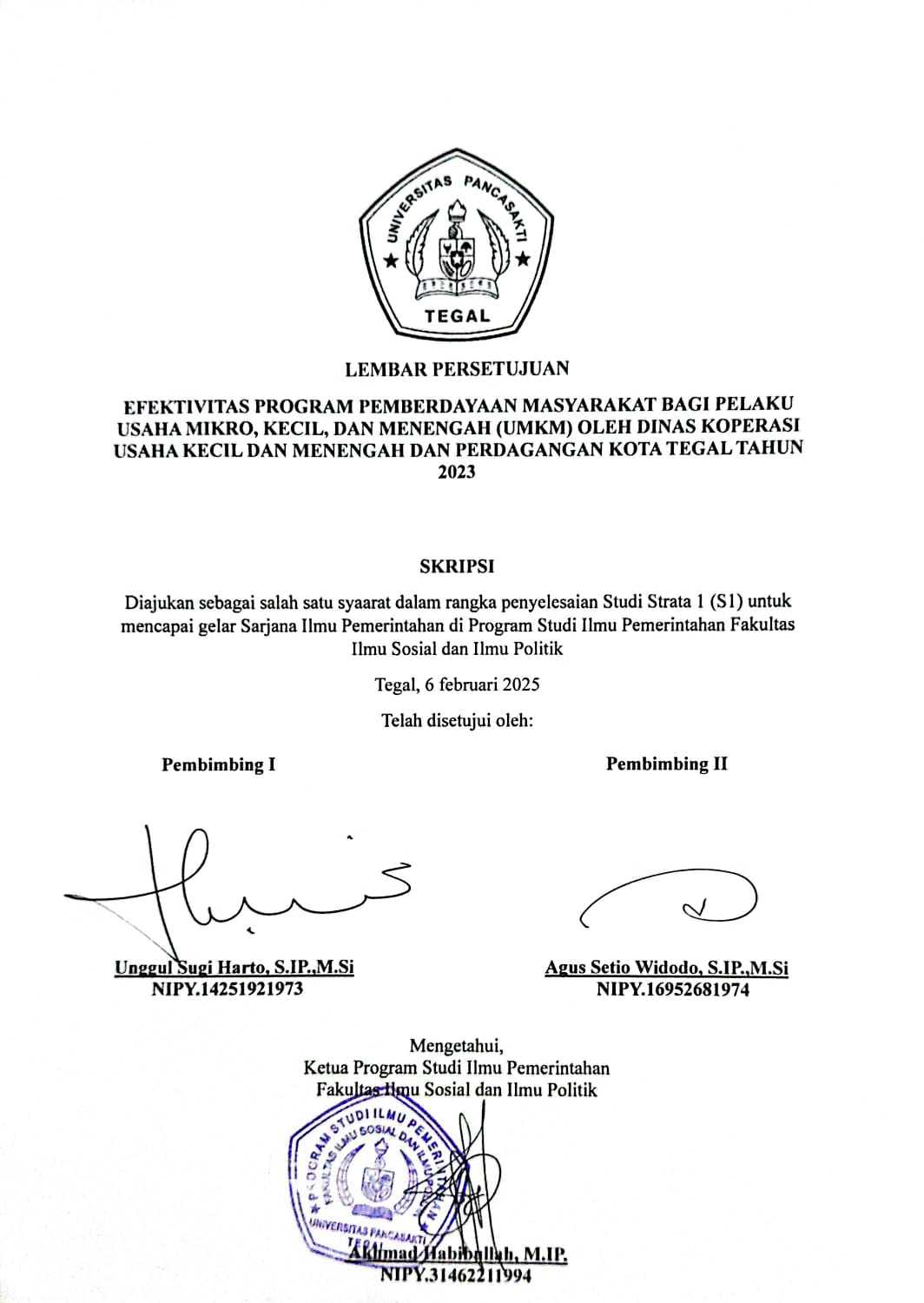
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

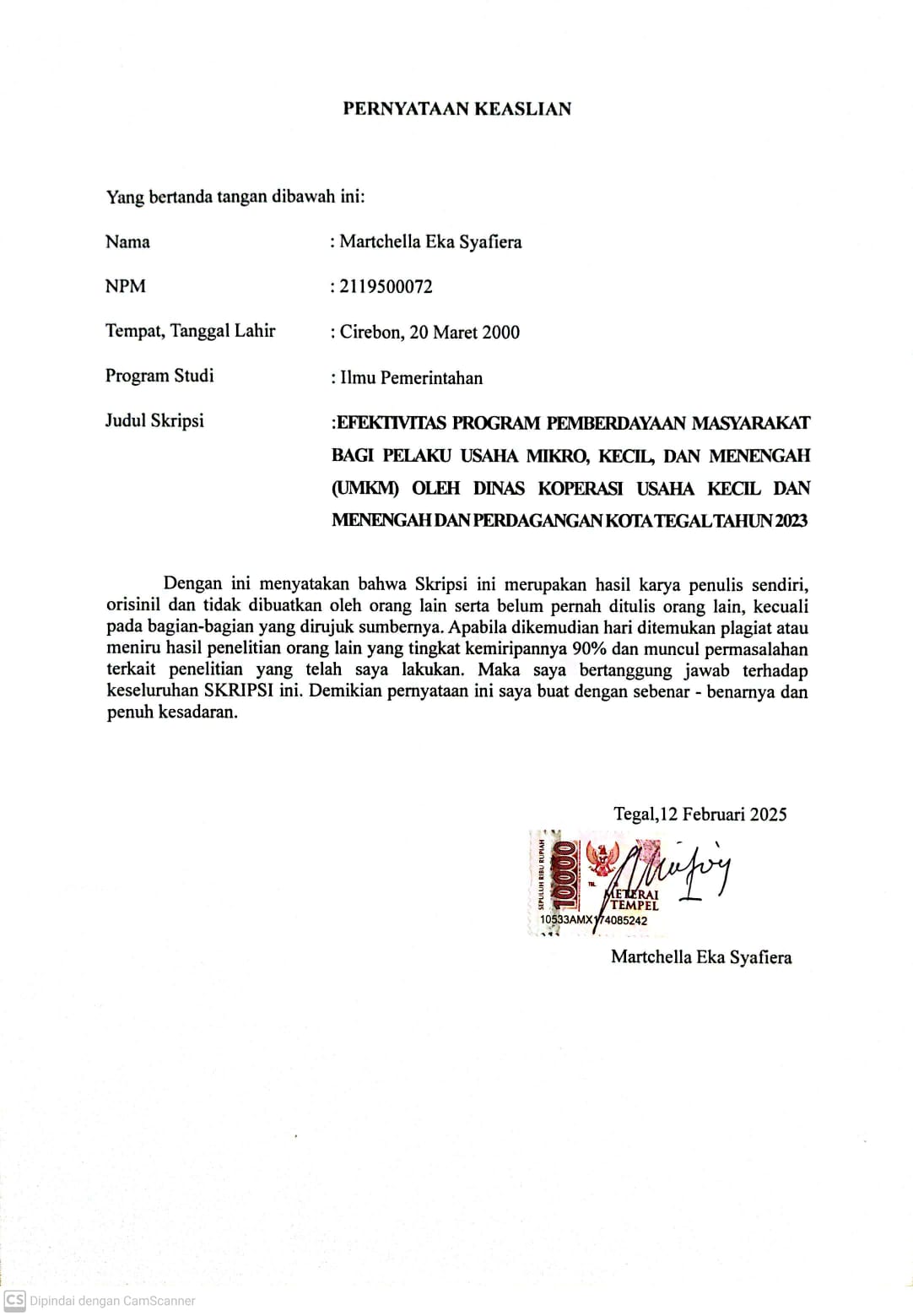
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

**MOTTO**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang - gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan"

**(Boy Candra)**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah adalah benar”

**(Q.S Ar-Rum:60)**

"Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong"

*"Gonna fight and don't stop, until you’re proud"*

**PERSEMBAHAN**

Allhamdulillahirobil’alamin atas rahmat dan hidayah-nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karna mungkin ada sesuatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Segala perjuangan yang sudah saya lalui hingga bisa menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan saya kuat.

1. Kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Syafarudin. Yang selalu memberkan semangat motivasi, dukungan dan doa sehingga saya mampu mendapatkan gelar ini. Semoga papah selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya amin.
2. Kepada pintu surgaku, ibu Siti Roidah. Wanita hebat yang telah melahirkan saya, yang sangat berperan penting dalam hidup saya. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberikan semangat dan doa yang selalu mengiringi langkah chella. Saya yakin bahwa doa mamah telah banyak menyelamatkan chella dalam menjalani hidup yang keras ini. chella sayang mamah.
3. Kepada adik saya tersayang Nawar Dwi Prasetiyo yang selalu memberikan doa dan dukunganya sehingga saya bisa menyelesaikan studi sampai sarjana. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat dari kaka ya de.
4. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadiranya, Muhammad Husnur Rofiq. Laki-laki yang sangat berjasa dalam hidup saya, setelah ayahku dan adiku. Sebagai laki-laki tampan yang selalu ada disisi saya, dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. membantu, memberkan semangat, mendengarkan segala keluh kesah saya dan telah berkontribusi banyak hal dihidup saya, sehingga saya bisa menggapai impian saya. Terimakasih telah menjadi terang digelap hidup chella, hidup lebih bahagia lagi ya.
5. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun kadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri, Martchella eka syafiera. Seorang anak pertama yang keras kepala tetapi terkadang sifatnya seperti anak-anak. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. chella hebat, bangga bisa menyelesaikan perjalanan panjang yang tidak mudah ini, meskipun tak jarang air mata dan kegelisahan datang menghampiri, dan tetap terus maju meskipun jalannya berat. Terimakasih ya sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. chella, bersinarlah dimanapun kamu memijakan kaki.

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT pendengar segala doa, serta telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal Tahun 2023”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kekuatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
4. Bapak Akhmad Habibullah, S.IP, M.IP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
5. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si, dan Bapak Agus selaku dosen pembimbing I dan II saya yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga telah memberi ilmu dan membantu terkait dengan administrasi selama menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
7. Pimpinan dan pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
8. Terimakasih kepada Bude Tati, Pade Gito, Mas Oky, Mba Rini, dan Ponakan lucu saya ishika yang telah memberikan dukungan dan doa selama berkuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Nadya Aulia yang telah menjadi teman bertukar cerita, memberi dukungan dan doa, menemani Pra-Riset, Sempro, Riset dan hingga terselesaikannya skripsi ini.Terimakasi banyak nadya.
10. Terimakasi kepada teman-teman lainya yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan hingga terselesaikanya skripsi ini
11. Dan terakhir terimakasih kepada tempat kerja saya, Matahari Departmen Store Pasifik Mall Tegal yang memberikan saya banyak pengalaman hidup dan saksi bisu saya berjuang keras kerja sambil kuliah dari awal semester satu hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tegal, 06 Februari 2025

Martchella eka Syafiera

**ABSTRAK**

Nama: Martchella eka Syafiera, NPM: 2119500072 Judul: Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal Tahun 2023. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I: Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP.,M.Si. dan Pembimbing II: Agus Setio Widodo, S.IP.,M.Si

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembangan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sebagai wujud dukungan upaya pemulihan ekonomi di tahun 2023 pasca pandemi covid19, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal berusaha untuk menjadi fasilitator bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah agar bisa terus bertahan dan tumbuh. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi adalah dengan mengadakan program pemberdayaan masyarakat.

Adapun Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan indikator pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal Tahun 2023 sudah cukup efektiv. Adapun yang menjadi kendala dalam menerapkan program pemberdyaaan masyarakat kurangnya tingkat pendidikan dan pengalaman masyarakat yang cukup rendah yang sedikit menghambat keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat ini.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Program Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

***ABSTRACT***

*Name: Martchella eka Syafiera, NPM: 2119500072 Title: Effectiveness of Community Empowerment Program for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by the Cooperatives, Small, and Medium Enterprises and Trade Service of Tegal City in 2023. Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Mr. Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Sc. and Advisor II: Agus Setio Widodo, S.IP., M.Sc*

*According to Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, empowerment is defined as an effort carried out by local governments, the business world, and the community synergistically in the form of fostering a climate and developing businesses for MSMEs, so that they are able to grow and develop into strong and independent businesses. As a form of support for economic recovery efforts in 2023 after the Covid-19 pandemic, the Tegal City Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Trade Service is trying to become a facilitator for Micro, Small and Medium Enterprises so that they can continue to survive and grow. One of the breakthroughs made by the Cooperatives Service is to hold a community empowerment program.*

*This type of research uses a qualitative method using indicators in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the Community Empowerment Program for Micro, Small and Medium Enterprises by the Tegal City Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Trade Service in 2023 has been quite effective. The obstacles in implementing the community empowerment program are the lack of education and experience of the community which is quite low which slightly hinders the sustainability of this community empowerment program.*

***Keywords:*** *Effectiveness, Community Empowerment Program, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*

# 

# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI xiii](#_Toc190206159)

[DAFTAR TABEL xiv](#_Toc190206160)

[DAFTAR GAMBAR xv](#_Toc190206161)

[DAFTAR BAGAN xvi](#_Toc190206162)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc190206163)

[I.1 Latar Belakang Masalah 1](#_Toc190206165)

[I.2 Rumusan Masalah 12](#_Toc190206166)

[I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 12](#_Toc190206167)

[I.3.1 Tujuan Penelitian 12](#_Toc190206168)

[I.3.2 Manfaat Penelitian 12](#_Toc190206169)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13](#_Toc190206170)

[II.1. Penelitian Terdahulu 13](#_Toc190206172)

[II.2. Kerangka Teori 16](#_Toc190206173)

[II.2.1 Efektivitas Program 16](#_Toc190206174)

[II.2.2 Pemberdayaan Masyarakat 22](#_Toc190206175)

[II.2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 31](#_Toc190206176)

[II.3 Definisi Konsep 33](#_Toc190206177)

[II.3.1 Efektivitas 33](#_Toc190206178)

[II.3.2 Program 34](#_Toc190206180)

[II.3.3 Pemberdayaan Masyarakat 34](#_Toc190206182)

[II.3.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 34](#_Toc190206183)

[II.4. Pokok-pokok Penelitian 34](#_Toc190206184)

[II.5. Alur Pikir Penelitian 36](#_Toc190206185)

[BAB III METODE PENELITIAN 37](#_Toc190206186)

[III.1 Jenis Dan Tipe Penelitian 37](#_Toc190206188)

[III.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 37](#_Toc190206189)

[III.3. Jenis dan Sumber Data 37](#_Toc190206190)

[III.4 Informan Penelitian 38](#_Toc190206191)

[III.5 Teknik Pengumpulan Data 39](#_Toc190206192)

[III.6 Teknik Analisis Data 40](#_Toc190206193)

[BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 42](#_Toc190206194)

[IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 42](#_Toc190206196)

[IV.2 Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tegal 58](#_Toc190206233)

[BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65](#_Toc190206250)

[V.1 Hasil Penelitian 66](#_Toc190206252)

[V.2 Hasil Pembahasan 111](#_Toc190206261)

[BAB VI PENUTUP 123](#_Toc190206271)

[VI.1 Kesimpulan 123](#_Toc190206273)

[V1.2 Saran 127](#_Toc190206274)

[DAFTAR PUSTAKA 129](#_Toc190206275)

# 

# DAFTAR TABEL

[Tabel I. 1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 5](#_Toc188905935)

[Tabel I. 2 Agenda Pendidikan dan Latihan Perkoperasian oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Tegal 5](#_Toc188905936)

[Tabel I. 3 Agenda Pekerjaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Tegal 6](#_Toc188905937)

[Tabel IV. 1 Daftar Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jurusan 54](#_Toc188905954)

[Tabel IV. 2 Pengelompokan Jumlah Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengikut program pemberdayaan masyarakat Tahun 2023 6](#_Toc188905956)0

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar II. 1 Skema Alur Pikir 36](#_Toc188906518)

[Gambar IV. 1 Peta Wilayah Kota Tegal 43](#_Toc188906527)

[Gambar IV. 2 Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal 44](#_Toc188906528)

# DAFTAR BAGAN

[Bagan IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal 49](#_Toc188906750)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurut Soerjono Soekanto (1990) kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah.

Masalah besar yang dihadapi negara berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama-sama dan terkoordinasi. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal, Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan terobosan dengan meluncurkan program Pemberdayaan Masyarakat. Melalui program Pemberdayaan Masyarakat dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka berperan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Ada banyak pengertian dari kata efektivitas, banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan atau justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Tangkilisan, 2005:141). Sesuatu dapat di sebut efektif, apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah tentukan sebelumnya. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif. Efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertibangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, Pemantauan Program. Efektivitas merupakan tolak ukur yang penting untuk mengukur sejauh mana program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kota Tegal sudah berjalan, untuk membandingkan antara renana dan proses yang dilaukan dengan hasil yang diapai serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program pemberdayaan masyarakt yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kota Tegal.

*Empowerment,* atau pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti *eksistensialisme*, *phenomenologi*, *personalisme* dan kemudian lebih dekat dengan gelombang *NeoMarxisme*, *Freudianisme*, *Strukturalisme*, dan *Sosiologi kritik* *Frankfurt School*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran *post-modernisme*, Diawali pada akhir tahun 1960an, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan yang lain seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar.

Program Pemberdayaan yang ada di Kota Tegal tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, khususnya bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Terdapat bermacam-macam pemberian program pemberdayaan kepada masyarakat, antara lain Pelatihan Design Kemasan Usaha mikro, Pelatihan Manajemen Operasional dan SDM Pelatihan Inkubasi Mentor UMKM, Pelatihan Fotografi Profesional Bersertifikat, Pelatihan Pemasaran Online 1, Pelatihan Pemasaran Online II, Pelatihan UKM Go Digital Go Modern. (Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan).

**Tabel I. 1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**



*Sumber:Kerangka Acuan Kerja/Term Of Referene Dana Alokasi Anggaran (DAK Non Fisik)*

Adapun beberapa agenda yang di lakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal, khususnya oleh bagian bidang Pemberdayaan Masyarakat, selama tahun 2023, dalam menerapkan program Pemberdayaan Masyarakat Antara lain:

**Tabel I. 2 Agenda Pendidikan dan Latihan Perkoperasian oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Tegal**



*Sumber:Kerangka Acuan Kerja/Term Of Referene Dana Alokasi Anggaran (DAK Non Fisik*

**Tabel I. 3 Agenda Pekerjaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Tegal**



*Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal 2023*

Sudah kurang lebih dua tahun Indonesia tertimpa pandemi covid-19. Dampaknya bisa langsung terasa ke berbagai sektor mulai dari kesehatan ekonomi, pendidikan hingga kegiatan sosial, Pemerintah sejak awal pandemi telah menempatkan UMKM sebagai perioritas utama penerima manfaat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). UMKM memang merupakan sektor yang paling terpukul oleh dampak pandemi covid-19 dikarenakan banyaknya masyarakat pekerja yang terlibat langsung. Aksi pemulihan yang inklusif secara kolektif dan mengerucut pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung kebangkitan UMKM, Dalam hal ini sektor bisnis dapat menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hingga kini, sektor bisnis juga telah mengambil bagian untuk mengembangkan UMKM demi pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Adapun anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang di peruntukan sebagai Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Tegal sendiri yaitu sebesar Rp. 410.170.000,00 (Empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dana ini termasuk terkeil di bandingkan dengan Dana Alokasi Khusus di kota lain di Jawa Tengah.

Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Menurut Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah dimana menjelasakan bahwa Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan bisnis setiap tahunnya lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)

Penentuan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008. Kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) huruf a dan huruf b. Nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Terdapat tiga kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu mikro, kecil, dan menengah. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah banyak yang mengetahui kriteria usahanya. Namun, saat ini juga masih terdapat banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mengetahui kriteria usahanya karena beberapa faktor. Penentuan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia didasarkan pada besarnya omzet dan aset kekayaan. Namun, World Bank dan Lembaga yang terkait lainnya menentukan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditentukan oleh beberapa komponen seperti: Kecamatan, Kelurahan, Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat, Telepon/HP, Jenis Usaha, Jumlah Karyawan, Aset, Omset, Tahun Berdiri. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan klasifikasi menggunakan algoritma klasifikasi yang ada sehingga diperoleh data kriteria lebih cepat.

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah cukup besar dalam pembangunan, nampaknya harus selalu diberdayakan agar manfaatnya semakin dirasakan. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) tergolong jenis usaha marjinal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Bagi masyarakat miskin yang telah memasuki usia kerja, mayoritas dari mereka berpendidikan rendah, ketrampilan yang minim serta modal yang sedikit. Salah satu jenis pekerjaan yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan bekerja atau membuka lapangan kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disamping tidak memerlukan modal yang banyak, juga kurang mensyaratkan tingkat keterampilan tenaga kerja yang tinggi sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang paling diminati terutama bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2023 di Indonesia mencatatkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat hampir 66 juta orang dengan kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, Setara Rp9.580 triliun dan menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%). dari jumlah tersebut diantaranya bekerja di sektor Usaha Mikro Kecil dan di sektor usaha menengah (sumber: https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/)

Begitu besarnya peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, maka perlu adanya perhatian yang lebih besar untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan pemberdayaan Masyarakat, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. Namun pada kenyataanya tidak mudah untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, karena dalam pertumbuhanya sangat banyak mengalami kendala-kendala dan keterbatasan sehingga kurang mampu untuk berkembang.

Sebagai wujud dukungan upaya pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 tentang cipta kerja. UU cipta kerja diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Kehadiranya diharapkan dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasa pandemi covid-19 yang masih mencengkram Indonesia dan Dunia.

Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi tugas membina dan mengembangkan UMKM, berusaha untuk menjadi fasilitator bagi Usaha Mikro agar mampu bersaing dengan usaha mikro di daerah lain melalui Program Pengembangan UMKM dan salah satu arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 adalah untuk meningkatakan fasilitas perizinan usaha mikro kecil dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil di Kota Tegal yang salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai mana di jelaskan dalam Undang–Undang Nomor. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Keberadaan usaha kecil menengah (UMKM) saat ini tidak terlepas dari peran penting Pemerintah Kota Tegal serta Dinas Koperasi dan Perdagangan. Dapat dilihat dari sebagian besar pelaku usaha yang ada di Kota Tegal memiliki usaha kecil dan menengah, hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan Usaha Kecil Menengah yang ada di Kota Tegal Tahun 2023 yaitu terdapat 141.856 ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah terdapat 141.856 ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah (Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tegal). Setelah di uraikan maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal”.

## I.2 Rumusan Masalah

Masalah yaitu ketimpangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah yaitu pertanyaan yang akan di cari jawabanya melewati pengumpulan data (Sugiyono, 2015). Berdasarkan kasus dan data yang diperoleh maka diuraikan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Tegal?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam menerapkan Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menegah di Kota Tegal?

## I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Jika di lihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas program pemberdayaan masyarakat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Tegal

2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Tegal

### **I.3.2 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

1. Berguna untuk pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam program pemberdayan masyarakat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Bermanfaat untuk menambah literatur dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa

#### 2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis terkait efektivitas program pemberdayaan masyarakat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai syarat penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal.

1. Bagi Pegawai

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal agar dapat meningkatkan kualitas kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menerapkan program pemberdayaan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Dan Menenga (UMKM) di Kota Tegal dan menjadi langkah awal yang positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengukuran kinerja pegawai.

1. Bagi Instansi

Sebagai saran atau masukan bagi pemerintah Kota Tegal khususnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Sehingga akan lebih baik lagi kinerja para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu

Penulis dapat menggunakan refrensi sebelumnya sebagaimana titik awal untuk menulis sampai pada akhirnya memiliki teori yang cukup untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Peneliti tidak dapat menemukan penelitian terkini dengan judul yang sama, dan manfaat dari penelitian sebelumnya disajikan untuk memperkaya penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, namun tidak semua hasil penelitian tersebut dapat memenuhi tujuan penelitian tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang diterima dalam bentuk artikel jurnal hingga skripsi sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh (Irman Nurrachman Saputra, 2018) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ciamis”. Didapatkan kesimpulan bahwa Berdasarkan pengolahan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis selama ini belum berjalan dengan efektif. Hasil Penelitian menunjukan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan tidak terlaksananya 10 indikator dalam kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 11 indikator belum terlaksana dengan efektif dan hanya 1 indikator yang sudah terlaksana dengan efektif, namun belum cukup untuk dapat memberi efek yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Christian Punu, Sofia E. Pangemanan, Neni Kumayas. 2021) yang berjudul “Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado” Di dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan pengelolahan hasil wawancara dan observasi dapat di ketahui Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado bahwa komunikasi yang terjadi dalam kantor dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan, instruksi atau perintah pimpinan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado masih kurang tertata dengan baik dimana hanya beberapa program saja yang terlaksana ditahun 2020, tetapi program yang terlaksana yaitu pelatihan untuk pemberdayaan UKM terlaksana meski terlihat kendala kurangnya biaya yang digunakan untuk melaksanakan program.
3. Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Bahtiar Rifa’I, 2013) yang berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Siodarjo”. Di dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan pengelolahan hasil wawancara dan observasi dapat di ketahui bahwa Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Ikan dalam program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Siodarjo, dapat membantu para pengerajin kerupuk ikan yang ada di Desa Kedung Rejo terutama pada pengerajin kecil dan musiman yang memang membutuhkan dana untuk meningkatkan pendapatan serta produksi kerupuk ikan mereka, dan juga berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampong kerupuk ikan.
4. Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Ravik Karsidi, 2007) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)” Di dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan pengelolahan hasil wawancara dan observasi dapat di ketahui bahwa Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah), Tidak bisa secara persial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan usaha mikro kecil menengah baik seara individu ataupun kelompok termasuk mendasar pada potensi sumberdaya manusianya. Dengann melibatkan secara partisipasi dan lebih bersifat bottom up.

Dalam penelitian terdahulu diatas menyimpulkan bahwa program Pemberdayaan Masyarakat sudah di terapkan dengan sangat baik di kalangan masyarakat tetapi ada beberapa yang belum sepenuhnya efektif dan signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, dan masih terkendala oleh berbagai masalah di antaranya yaitu program pelaksaaan yang belum tertata dan hanya beberapa program saja yang terlaksana. Maka dasar dari penelitian terdahulu bisa.menjadi tolak ukur atau referensi dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal”. Dengan perbedaan pada fenomena yang ada di Wilayah masing-masing peneltian di tinjau dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

## Kerangka Teori

### **II.2.1 Efektivitas Program**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Ada banyak pengertian dari kata efektivitas, banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan atau justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian dari efektivitas: Efektivitas menurut pendapat Steers (dalam Zainun, 1991 : 14) mendefenisikan efektivitas sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu keuntungan manfaat dalam organisasi dengan segala cara. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:109) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Efektif adalah pencapaian sasaran mengenai suasana dagang dan kemungkinan membuat laba/keuntungan. Penilaian terhadap efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta tentang seberapa banyak tujuan program dapat dicapai, seberapa besar komponen-komponen program telah berfungsi dalam pencapaian tujuan. Berbicara tentang efektivitas program maka persoalannya menjadi tumbuh kompleks apalagi diingat bahwa sumber masalah yang hendak dipecahkan tak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah, melainkan juga dapat berasal dari level sistem. Program atau usaha dikatakan efektif apabila suatu usaha mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Pengertian yang memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator berikut ini:

a. Ketepatan Sasaran

Program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan Sasaran Program yaitu sejauh mana program tepat dengan sasarannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini sasaran program pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi Kota Tegal adalah usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Koperasi Kota Tegal, telah terangkum beberapa kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan secara khusus kepada para UMKM. Kegiatan-kegiatan yang diadakan Dinas Koperasi Kota Tegal ini diharapkan dapat tepat untuk kelompok sasaran program, yakni Usaha Kecil Menengah, sehingga pada akhirnya diketahui sejauh mana keefektifan program Pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi Kota Tegal.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya. Sosialisasi Program Menurut Soerjono Soekanto (2016), sosialisasi didefinisikan sebagai proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Jika dikaitkan dengan penelitian ini “Efektivitas program pemberdayaan Masyarakat” yang ditujukan kepada “Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tegal” yang dalam hal ini adalah masyarakat atau kelompok sasaran program. Sosialisasi pada penelitian ini adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat agar bisa dipahami secara menyeluruh tentang apa saja yang berkaitan dengan program program pemberdayaan masyarakat. Menurut Budiani (2007) sosialisasi harus dilakukan agar program Program pemberdayaan masyarakat bisa dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh maysarakat tentang bagaimna kegiatannya, manfaat, serta pelaksanaan programnya. Dalam indikator sosialisasi ini kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian itu antara lain bentuk sosialisasi, media sosialisasi, intensitas sosialisasi, tujuan sosialisasi, dan yang terakhir manfaat sosialisasi.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana keseriusan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan Program Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Tanpa penetapan tujuan, pencapaian hasil hanya sebuah hal yang sulit diwujudkan. Dengan menetapkan tujuan, pelaksana program hanya akan berorientasi pada tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Untuk mengetahui ukuran efektif atau tidaknya suatu program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Budiani, 2007).

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan setelah diikutinya kegiatan program sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada peserta program. Pemantauan dilakukan untuk menyediakan informasi apakah program memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi peserta pasca mengikuti program. Kegiatan ini penting dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaan program berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga diketahui kekurangannya yang kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu. Sesuai dengan pernyataan Calyton dan Petry dalam Soekartawi (1995) yang menyatakan bahwa pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program. Adapun usaha dalam melakukan pemantauan oleh Dinas koperasi Kota Tegal dapat dilihat dari pelaksanakan kegiatan pemantauan kepada peserta program, pemantauan yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan peserta program, pemantauan kepada peserta program yang dilakukan dengan berbagai media telekomunikasi, pemantauan kepada peserta program secara berkala oleh Dinas Koperasi, dan yang terakhir yaitu sejauh mana kebermanfaatan kegiatan pemantauan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Kayatomo dalam, Rukmana (2013:36) mendefinisikan program sebagai rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat suatu tujuan. Sedangkan menurut Farida Yusuf Tayibnapis (2013 : 9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dilaukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Kegiatan ataupun program disebut efektiv apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektiv apabila program tersebut berhasil diterapkan dan memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif. Program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26).

Program yang diusulkan dari pemerintah yaitu program pemberdayaan masyarakat oleh Dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan Kota Tegal, memiliki beberapa bentuk yang penting yaitu dorongan sosialisasi dan pembinaan. Program ini merupakan tahap perencanaan serta persiapan untuk membentuk UMKM yang maju dan berdaya saing. dalam pengertiannya pemahaman program dibuat agar suatu program memiliki pelaksanaan yang jelas baik dari visi dan misinya serta memiliki tujuan yang terarah agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dari sasaran dan dalam kurun waktu yang telah di rencanakan. dari perencaanaan tadi implementasi sangat bergantung terhadap pemahaman program agar program tersebut dapat berhasil serta berjalan secara sistematis. Upaya dorongan daripada pendampingan UMKM juga berperan penting untuk membentuk pola berpikir kepada pelaku usaha agar bisa berinovasi serta memiliki integritas yang kuat dalam mempertahankan bidang usahanya.

### **II.2.2 Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1.Pengertian Pemberdayaan**

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembangan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Sutoro Eko (2002), Pemberdayan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posis, tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Menurut Djhani, (2003 : 43), Mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerlwess*) dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga menjadi keseimbangan.

Prijono dan Pranarka (1996), Pemberdayaan ialah manusia sebagai subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Rappaport (1984 : 49), mengungkapkan pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai dan memahami serta berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada aspek pendelegasian atau pemberian kekuasaan dan memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan pada individu, kelompok serta masyarakat yang mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan juga menekankan makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup sendiri.

Menurut Parsons (1994 : 49) Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya.

Menurut Pranarka dan Muljarto (1996 : 50), Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun upaya eksitensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam proses kerangka aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut Slamet (2003 : 49), Menekankan bahwa hakikat Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

Dari beberapa pengertian, memperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan Masyarakat adalah proses pengembangan masyarakat agar lebih berdaya guna sehingga mampu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Sehingga memiliki daya saing, serta mampu hidup sendiri.

#### **2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah cara berfikir masyarakat untuk melakukan pemberdayaan secara mandiri di kalangan masyarakat tersebut.

Kegiatan pemberdayaan tersebut yang pada hakikatnya merupakan pengembangan sosial dalam proses-proses terkait yang harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung mulai dari Pemerintah, Anggota Legislatif, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, Masyarakat, dan Juga Media Sosial.

Menurut Oos. M. anwas (2003 : 58), Pemberdayaan ditujukan agar klien atau sasaran mampu menigkatkan kualitas kehidupanya untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri, dalam pelaksanaan pemberdayaan, khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pembedayan masyarkat yaitu :

a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri pemberdayaan.

b. Kegiatan pemberdayaan di dasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sasaran, hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dirinya. Proses pemberdyaan di mulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat di kembangkan dan diberdayakan untuk mandiri.

c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.

d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarkat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerja sama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokalnya sebagai jati masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. tahapan ini dilakukan secara logis dari sifatnya sederhana menuju yang komplek.

f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehatia-hatian dari agen pemebrdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.

g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.

h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan serta penyehatan lingkungan.

i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasan untuk terus belajar, individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan sumber daya yang tersedia.

j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan sebagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.

l. Sasaran pemberdayaan perlu dikembangkankan sebagai bekal manuju kemandirian. Mulai dari berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking atau sebagai kemampuan yang di perlukan dalam era globalisasi.

m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetisi) yang cukup dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pamberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, lembaga swadaya masyarakat, relawan, dan anggota masyarkat lainya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemapuan.

Pada dasarnya kegiatan pemberdayan bukan sekedar membangun sesuatu, memberikan pelatihan, melakukan pendampingan, memberikan sumbangan atau hadiah dan bentuk-bentuk lainnya. Pemeberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri yang sesuai dengan situasi dan potensi dan kebutuhan setiap masyarakat. Dan pemberdayaan masyarakat juga dapa diartikan sebagai pembangunan yang di rencanakan secara bersama sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu berdaya mandiri dan bersaing untuk kebutuhannya.

#### **3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Mardikanto (2010) Pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Bina manusia

Yang termasuk kedalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu:

1. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.

2. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang meliputi;

a. Kejelasan visi,misi, dan budaya organisasi.

b. Kejelasan struktur organisasi, Kompetensi dan strategi organisasi.

c. Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya.

d. Interaksi antar individu di dalam organisasi.

e. Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepntingan (Stakeholders) yang lain.

b. Bina usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) akan menamba kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

c. Bina lingkungan

Terpenuhnya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitas/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d. Bina kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial, apabila memenuhi empat komponem yaitu:

1. Komponem person, dimana orang-orang yang terlibat didalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas

2. Komponem kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi

3. Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut

4. Komponem struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauannya.

**4. Program Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam setiap pelaksanaan program pemberdayaan selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program pemberdayaan kepada masyarakat. Sehingga diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah khusunya Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum menginjak pada tahap pelaksanaan program pemberdayaan.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk mengoprasikan program-program yang telah di susun agar menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan program pemberdayaan dimulai dari tahap pelatihan dan peyuluhan, pengembangan dan penyebarluasan serta evaluasi program. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan program yang telah diberikan juga berasal dari pihak masyarakat sendiri yang masi berpikiran sempit, serta kondisi fisik yang terkadang mengalami penurunan sewaktu-waktu dan daya beli konsumen yang tidak stabil,serta faktor lingkungan sekitar.

Adapun Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal pada tahun 2023 antara lain Frozen Food, Pelatihan Jasa Usaha Makanan (Praktek membuat aneka kue tradisional, praktek membuat produk olahan ikan), Pelatihan Barista (Praktek pembuatan kopi), Pelatihan membuat Pastry dan Bakery, Pelatihan Tata Boga Aneka Masakan Nusantara untuk Masyarakat, Pelatihan Fotografi, Pelatihan Pemasaran Online dan Pelatihan UKM Go Digital Go Modern. (Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan)

### **II.2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

#### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang disingkat (UMKM) adalah jenis bisnis yang berperan penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, UMKM mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian. Jenis usaha ini dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan merupakan anak usaha atau cabang perusahaan kelas menengah atau besar. Perekonomian suatu negara bergantung dari usaha yang dilakukan oleh rakyatnya.

#### **2. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak lansung dengan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang, yaitu dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)

#### **3. Partisipasi Masyarakaat**

Program pemerintah akan bisa terealisasikan dengan baik apabila dalam prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Seperti misalnya program yang dicanangkan oleh pemerintah. program yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan yang sudah begitu kompleksnya di Indonesia.. Maka dari itu agar tumbuhnya kesadaran di masyarakat akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait untuk merubah pola pikir masyarakat untuk peduli.

Partisipasi menurut Sajogyo (1998) adalah peluang untuk ikut menentukan kebijaksanaan pembangunan serta peluang ikut menilai hasil pembangunan. Berbeda dengan Sajogyo, Tilaa (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Sedangkan, Nasdian (2006) mendefinisikan pasrtisipasi sebagi proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

## II.3 Definisi Konsep

### **II.3.1 Efektivitas**

### Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai

### **II.3.2 Program**

### Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana.

### **II.3.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posis, tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

### **II.3.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan merupakan anak usaha atau cabang perusahaan kelas menengah atau besar.

## II.4. Pokok-pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian merupkan penegertian secara rinci dari ulasan diatas maka dengan judul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal”. agar dari pokok tersebut dapat memberikan fungsi-fungsinya serta dapat memberi arahan bagaimana yang diteliti itu dapat diukur dengan indikator-indikatornya. Sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan maka penulis mengajukan pokok penelitian ini yaitu :

“Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal”:

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Bina Manusia

b. Bina Usaha

c. Bina Lingkungan

d. Bina Lembaga

2. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Partisipasi

b. Sumber Pembiayaan

c.. Hasil yang di capai

## II.5. Alur Pikir Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alur pikir yang dijelaskan melalui bagan dibawah ini :

**Gambar II. 1 Skema Alur Pikir**

Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2014

Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemberdayaan Masyarakat:

a. Bina Manusia

b. Bina Usaha

c. Bina Lingkungan

d. Bina Kelembagaan

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Partisipasi

b. Hasil yang di capai

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## III.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Sebelum memulai penelitian, penting untuk mengidentifikasi jenis penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penelitian tersebut dengan tujuan memudahkan proses analisis data. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu masalah. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejadian yang dialami informan. Penelitian ini mendeskripsikan “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal”.

## III.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian atau tempat penelitian ini di lakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal. Waktu penelitian ini sebagai awal pertemuan antara peneliti dengan pencarian fakta yang ada dilapangan dengan bentuk prariset pada tanggal 18 Januari 2024.

## III.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi untuk bahan penelitian penulis menggunakan data :

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh sendiri oleh peneliti atau data yang didapat secara langsung di lokasi penelitian. Wawancara merupakan sumber data primer penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan yang berkaitan dengan “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal”.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dihasilkan tidak secara langsung atau data dukung penelitian yang dapat didapat dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.

## III.4 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi, yang menguasai atau memahami data atau fakta yang terjadi. Metode purposive sampling digunakan karena pemilihan informan melalui beberapa pertimbangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan informan yang terlibat dan memahami Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal.

Adapun pihak – pihak yang akan di jadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

1. Unsur Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal yang terdiri dari :

a. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

b. Staf Fungsional Kewirausahaan

2. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3 orang

## III.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian kali ini, digunakan metode pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan orang saling membagi informasi yang memperkuat kasus dan ide melalui Tanya jawab secara langsung bertemu sehingga dapat disusun suatu makna kedalam pemikiran topik tertentu. Peneliti melaksanakan wawancara berkomunikasi kepada sumber informan terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara terstruktur yakni menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan terkait perihal permasalahan yang akan diteliti. Pendukung berupa alat sebagaimana dipakai untuk penelitian tersebut menggunakan buku,alat tulis,perekam suara (recording).

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan pada lokasi penelitian terkait dengan hal-hal yang menyangkut penelitian. Pada penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi pada tempat penelitian. Observasi dalam penelitian ini di gunakan untuk melihat bagaimana efektivitas program pemberdyaan masyarakat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilaukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni rangkuman informansi mengenai fenomena yang lalu didapatkan oleh informan sehingga Dokumentasi menjadikan teknik pengumpulan data, baik berupa aturan, gambar, laporan hasil yang dikerjakan, serta berupa foto atau dokumenter.

4. Studi Literatur

Studi Literatur merupakan pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan di teliti (Sarwono, 2006).

## III.6 Teknik Analisis Data

Metode kualitatif digunakan dalam analisis data sesuai dengan sistematika pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan sintesa, mendeskripsikan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan melakukan kesimpulan dengan cara ini sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2019). Kemudian dengan menganalisis secara sistematis data yang tepat melalui tiga langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksikan berbagai data yang didapat, artinya merangkum dan memilih utama, atau fokus pada suatu yang terpenting. Data yang telah dirangkum peneliti mendapatkan pandangan secara akurat dan mendukung memeperlancar dalam mengumpulkan data.

b. Penyajian data

Penelitian kualitatif adalah kaliamat dengan sifatnya deskriptif. Informasi diterima dilapangan dapat diolah kedalam bentuk kalimat tertulis secara murni dan bersifat faktual untuk menyajikan data tersebut agar mendapatkan yang seseuai ada dilapangan.

c. Penarikan kesimpulan

Sesudah peneliti mengumpulkan dengan baik semua data dari hasil penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal, maka penulis merangkum dan menyimpulkan secara mendetail. Serta memeperoleh data juga harus mengembangkan sesuai pada kerangka pemikiran serta teori relevan dengan kesesuaian tujuan penelitian.

# BAB IV

# DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

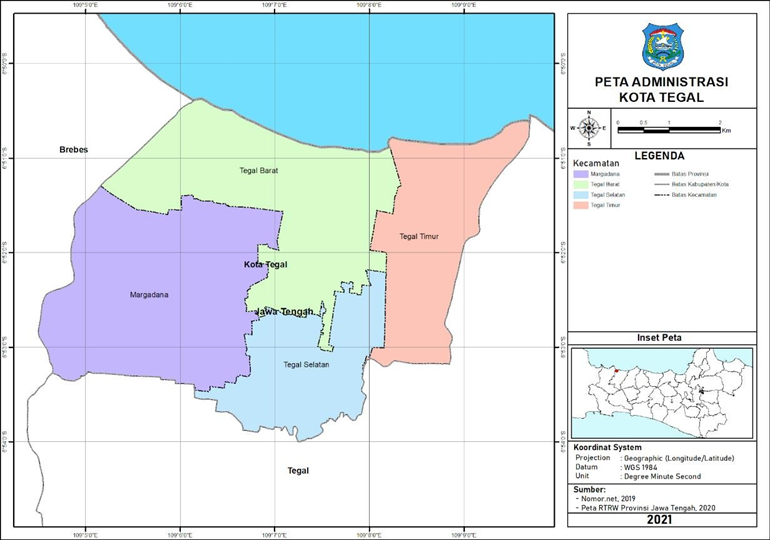
Untuk memberikan pengetahuan mengenai objek penelitian penulis memberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian. Pentingnya, mengetahui lokasi penelitian agar memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian serta memudahkan pembaca mengetahui lokasi penelitian dalam penelitian ini. Penelitian tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal akan memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal.

## IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

**IV.1.1 Gambaran Umum Kota Tegal**

Kota Tegal merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang terdiri dari 282.781 ribu jiwa yang tersebar pada 4 kecamatan dan 27 kelurahan dengan batas administrasi Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal, serta Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Letak kota ini diantara 109°08’–109°10’ Bujur Timur dan 6°50’–6°53’ Lintang selatan, memiliki luas wilayah 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 hektar. Posisi Kota Tegal sangatlah strategis jika dilihat dari letak geografisnya karena kota ini sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di utara Pulau Jawa yaitu dari barat ke timur (Jakarta - Tegal - Semarang - Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa ( Jakarta - Tegal - Purwokerto - Yogyakarta - Surabaya ) atau sebaliknya.

**Gambar IV. 1 Peta Wilayah Kota Tegal**



*Sumber : Website Pemerintah Kota Tegal*

Kota Tegal berada di wilayah Pantura dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km. Ketinggian dari permukaan laut adalah ± 3 meter di wilayah utara dan barat. Penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah yaitu seluas 3.335 hektar. Dari total lahan bukan sawah tersebut 2.719,08 hektar merupakan lahan untuk bangunan dan pekarangan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah hanya 631 hektar dengan pengairan menggunakan pengairan teknis. Karena berdekatan dengan laut maka terdapat 4 kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Kelurahan Panggung dan Mintaragen di Kecamatan Tegal Timur serta Kelurahan Tegalsari dan Muarareja di Kecamatan Tegal Barat. (Sumber: Website Pemerintah Kota Tegal).

**IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal**

**Gambar IV. 2 Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal**



*Sumber: Website Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tegal.*

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tegal atau yang biasa disebut Dinkop adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan yang di pimpin oleh Kepala Dinas, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan mempunyai tugas Menyelenggarakan Administrasi dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengah dan Perdagangan Kota Tegal serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Tegal tepatnya berada di JL. Hangtuah No.21, Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Perdagangan Kota Tegal, merupakan bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro, dan bidang perdagangan. Rincian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal diatur berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal. (Sumber: Website Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal).

**IV.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal.**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal menetapkan Visi Misi dan Tujuan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal berpedoman pada Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Perdagangan dan Jasa yang didukung oleh Industri, Koperasi dan UMKM yang tangguh dan berdaya saing”.

Sebagai upaya perwujudan Visi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal menetapkan beberapa Misi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelancaran distribusi barang, penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen
2. Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM yang sehat dan SDM pengelola yang professional
3. Meningkatkan daya saing produk industri Kecil dan Menengah.

Dalam mencapai misi tersebut terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan
2. Meningkatkan kinerja koperasi dan produktivitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan kinerja sektor industri

**IV.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal**

1. **Tugas Pokok**

Membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1. **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, dan UPTD.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi dan bidang pemberdayaan usaha mikro.
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dinas.
5. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
6. Penyelenggaraan kerja sama bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, bidang pemberdayaan koperasi dan bidang pemberdayaan usaha mikro.
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**IV.1.5 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal dilengkapi dengan struktur organisasi yang mencakup keseluruhan tugas dan fungsi yang ditetapkan, berikut struktur organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal:

**Bagan IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal**

|  |
| --- |
| **KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TEGAL** |
| Muhammad Rudy Herstyawan, ST, M.Si |

|  |
| --- |
| **SEKERTARIS DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TEGAL** |
| Denny Anggoro, SE, MM |

|  |
| --- |
| **KA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN** |
| Restuningsih, S.IP |

|  |
| --- |
| **KA SUBBAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN KEUANGAN** |
| Sri Sulistiani, S.E.,M.Si |

|  |
| --- |
| **KA. BIDANG PERDAGANGAN** |
| Yudi Arianto, S.Kom. M.Kom |

|  |
| --- |
| **KA. BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO** |
| Yulia Herawati Pitna, S.STP.,M.Si |

|  |
| --- |
| **KA. UPTD METROLOGI LEGAL** |
| Charis, ST. |

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tegal.*

## Tugas pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tegal sebagai berikut.

## 1. Kepala Dinas

## Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

## Kepala Dinas Koprasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, mempu

## nyai tugas merumuskan sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan daerah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

## 2. Sekretaris Dinas

## Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

## Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integritas program perencanaan, dan perumusan kebijakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal

## Pembinaan dan pelayanan administrasi penatausahaan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keuangan.

## Pembinaan dan pelaksaaan hubungan masyarakat.

## Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarahan di Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal

3. KA Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

* Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga
* Melaksanakan urusan kepegawaian, seperti penyelesaian kartu pegawai, askes, taspen, cuti, dan kenaikan gaji
* Melaksanakan urusan rumah tangga, seperti keamanan dan kebersihan
* Melaksanakan urusan kearsipan, seperti penataan, penyimpanan, dan pengarsipan surat-surat dinas
* Melaksanakan urusan kehumasan dan protokoler
* Melaksanakan urusan perjalanan dinas
* Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana
* Melaksanakan urusan dokumentasi
* Melaksanakan urusan kerja sama
* Melaksanakan urusan pelayanan kepada seluruh unit kerja

4. KA Subbagian Perencanaan evaluasi dan Keuangan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

* Menyusun rencana kerja subbagian
* Menyusun bahan perencanaan program dan kegiatan
* Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
* Menyusun bahan rencana anggaran
* Melakukan penatausahaan keuangan
* Melakukan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan
* Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan
* Menyusun laporan keuangan
* Melakukan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan
* Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait

## 5. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

## Mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas - tugas di bidang koperasi.

## Menyusun program kerja dan rencana kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi.

## Merencanakan usulan anggaran belanja kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi.

## Melaksanakan pemrosesan dan pengumuman pengesahan, pendirian, penggabungan, peleburan, pembubaran, dan perubahan anggaran dasar koperasi.

## Melakukan penilaian dan pengawasan penyelenggaraan usaha kecil dan menengah.

## Melaksanakan fasilitasi kemitraan, promosi, sarana, dan prasarana UMKM

## Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan UMKM.

## Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perkuatan permodalan koperasi.

## Melakukan pengembangan kewirausahaan.

## Melakukan pengembangan usaha mikro kecil menengah.

## 6. Bidang Perdagangan

## Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

## Menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis.

## Merencanakan dan membuat program kerja.

## Meningkatkan pelayanan publik.

## Membina, mengembangkan, memberdayakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

## Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas.

## Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## Mengkoordinasikan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

## Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah.

## Mengendalikan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar.

## Mengawasi pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah.

7. KA UPTD Metrologi Legal

* Perencanaan pengelolaan teknis operasional kemetrologian berdasarkan

kebijakan teknis dinas.

* Penyelenggaraan teknis operasional kemetrologian berdasarkan kebijakan

teknis dinas.

* Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas

teknis operasional kemetrologian.

* Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, rumah tangga, aset, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi

UPTD Metrologi Legal.

* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Berdasarkan uraian diatas merupakan bagian tugas dan tanggung jawab dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, yang bersinergi di Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal. Berikut nama pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jurusan:

**Tabel IV. 1 Daftar Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jurusan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAMA** | **JABATAN** | **PENDIDIKAN** | **JURUSAN** |
| MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, ST, M.Si | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah dan Perdagangan | (S2) | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| DENNY ANGGORO, SE, MM | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah dan Perdagangan | (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| YULIA HERAWATI PITNA, S.STP.,M.Si | Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | (S2) | MAGISTER SAINS |
| YUDI ARIANTO, S.Kom, M.Kom | Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | (S2) | MAGISTER KOMPUTER |
| RETNO HAPSARI, SH | Analis Perdagangan | (S1) | HUKUM PERDATA |
| MOCHAMAD SAMSUDIN, SE | Pengawas Perdagangan | (S1) | MANAJEMEN PERUSAHAAN |
| RESTUNINGSIH, S.IP | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | (S1) | ILMU PEMERINTAHAN |
| BASRODIN, SE | Pengawas Koperasi | (S1) | EKONOMI MANAJEMEN |
| SRI SULISTIANI, S.E.,M.Si | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | (S2) | MAGISTER AKUNTANSI |
| SUPRIYANTO, A.Md | Pengembang Kewirausahaan | (D3) | TEKNIK SIPIL |
| CHARIS, ST | Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | (S1) | TEKNIK INDUSTRI |
| MADYA BAMANISA, S.Pd | Penyuluh Koperasi | (S1) | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN |
| MOHAMAD TEGUH SUTRISNO, S.SI | PENERA | (S1) | FISIKA |
| TRI WIDAYATI | PENGADMINISTRASI UMUM | SLTA |  |
| SOLECHA | Pengadministrasi Keuangan | SLTA | UJIAN PERSAMAAN (UPERS) |
| MUCHAMAD ABUD, ST | PENGAWAS KEMETROLOGIAN | (S1) | TEKNIK INDUSTRI |
| SANDI SATRIA, A.Md | PENERA | (D3) | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI |
| AFIFUDIN, S.E. | Analis Bimbingan Usaha | (S1) | MANAJEMEN |
| SUBEKHI, A`.Md | Pengelola Data | (D3) | MANAJEMEN INFORMATIKA |
| MOHAMMAD EDY FIRDAUS | Juru Pungut Retribusi | SLTA | SMEA TATA USAHA |
| AMIN SUROSO | Pengelola Pasar | SLTA | ALIYAH |
| IMAM SUBEKTI | Pengelola Pasar | SLTA |  |
| MOCHAMAD BUNYONO | PENGADMINISTRASI UMUM | SLTA | STM LISTRIK |
| SODIKIN | Juru Pungut Retribusi | SLTA | SMA |
| SUPARDI | Juru Pungut Retribusi | SLTA | SMEA KEUANGAN |
| AGUS SUGIARTO | Pengemudi | SLTA | SMA |
| MOHAMAD DENI AFIT IRIANTO, A.Md | PRANATA KOMPUTER | (D3) | KOMPUTER |
| TARJONO | Juru Pungut Retribusi | SLTA | PAKET C |
| SRI INDRIASIH, A.Md. | Bendahara | (D3) | EKONOMI ADM KEUANGAN |
| NONI NUR AYUNI, A. Md. | Pengelola Pasar | (D3) | AKADEMI AKUNTANSI |
| SASMITO RAHARJO, A.MD.AK | Pengelola Pasar | (D3) | AKUNTANSI |
| ALI MUNIR | Juru Pungut Retribusi | SLTP |  |
| PEBRIE DWI PRIYANTO | PENGADMINISTRASI UMUM | SLTP | SMP UMUM |
| NASOFI | Pengelola Pasar | SD | UMUM |
| SAEFULLOH | Juru Pungut Retribusi | SLTP | PROGRAM PAKET B |
| FRIDA, S.IP | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | (S1) | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
| DEVITA ULFA, A.Md. | PENERA | (D3) | METROLOGI |

***Sumber: Data Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal Tahun 2023***

Tabel IV.1 merupakan data pegawai berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jurusan.Dari data tersebut menyebutkan total pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal sebanyak 37 Orang dengan Tingkat pendidikan S-2/Magister sebanyak 5 Orang, lalu tingkat S-1/Sarjana 10 Orang,Tingkat Pendidikan D3 sebanyak 8 Orang, Tingkat Pendidikan SMA sebanyak 10 Orang, Tingkat Pendidikan SMP Sebanyak 3 Orang dan Tingkat Pendidikan SD sebanyak 1 Orang.

## IV.2 Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tegal

# Kota Tegal merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah, dimana sebagian besar penduduk Kota Tegal memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan nelayan dan ada pula yang bermatapencaharian di bidang usaha industri, dan komoditi/produk. Untuk bidang usaha industri, meliputi: pembuatan kusen, pembuatan besi, stempel, lampu, plat nomor dan pigura. Bidang Usaha Perdagangan, meliputi : Usaha warteg, tahu Aci, buah-buahan dan minuman. Adapun untuk Bidang Usaha Jasa, meliputi: Jasa tambal ban, sol sepatu, jasa menjahit, salon, laundry dan perbaikan jok motor.

## IV.2.1 Peran Pelaku Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

# Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian. Peran sektor ini antara lain dalam penciptaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, penyediaan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai sarana untuk pengembangan SDM melalui praktik berwirausaha.

# Jumlah pelaku UMKM di Kota Tegal setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Kota Tegal pada tahun 2023 mencapai 141.856 ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah. Peningkatan UMKM ini berkontribusi besar terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal. Namun demikian UMKM masih banyak memiliki kelemahan dalam menjalankan usahanya,untuk itu dalam melakukan pemberdayaan ini diperlukan perencanaan yang lebih sistematis yang mampu memfasilitasi UMKM dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sehingga sektor ini dapat *survive* dan berkembang, dapat berperan lebih besar dalam perekonomian daerah.

# Namun demikian UMKM masih memiliki kelemahan dalam menjalankan usahanya. Beberapa kelemahan dan permasalahan UMKM tersebut antara lain: keterbatasan modal, kelemahan dalam pemasaran, kelemahan dalam teknis produksi, kelemahan dalam mutu, kelemahan dalam manajemen serta kelemahan dalam akses. Peran penting UMKM dalam perekonomian nasional, ternyata dalam realisasinya banyak menghadapi masalah, berbagai permasalahan UMKM tersebut baik menyangkut penguasaan aspek produksi dan teknologi, pengembangan aspek pasar dan pemasaran, keterbatasan masalah keuangan dan akses ke lembaga-lembaga penyedia sumber keuangan baik bank maupun lembaga non bank, serta kelemahan yang menyangkut aspek penguatan dan pengembangan SDM dalam menyikapi dinamika usaha yang semakin kompetitif.

Berdasarkan data menurut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal tahun 2023, program pemberdayaan masyarakat diikuti oleh antusias masyarakat Kota Tegal, banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal terus melakukan dorongan agar program pemberdayaan masyarakat terus berdampak positif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Dari data yang di peroleh terdapat pengelompokan jumlah peserta dengan usahanya dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pernah diikuti:

**Tabel IV.2 Pengelompokan Jumlah Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengikut program pemberdayaan masyarakat Tahun 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Usaha** | **Jumlah** |
| **Fashion dan Kuliner** | **1** |
| **Pendidikan dan Seni Budaya** | **1** |
| **Jasa Pemasaran Online** | **1** |
| **Industri Makanan** | **50** |
| **Minuman** | **7** |
| **Jasa Perorangan** | **5** |
| **Kuliner** | **20** |
| **Fashion** | **12** |
| **Kerajinan Tangan** | **32** |
| **Foto copy** | **1** |
| **Industri Perkebunan** | **1** |
| **Wedding Jasa Interior** | **1** |
| **Konsultan Pendidikan** | **1** |
| **Pedagang** | **1** |
| **Kontruksi bangunan Baja** | **1** |
| **Pedagang Kosmetik** | **1** |
| **Jasa Jahit** | **2** |
| **Olahan Ikan** | **2** |
| **Peretakan** | **1** |
| **Peternakan** | **1** |
| **Toko Sembako** | **2** |
| **Industri Logam** | **1** |
| **Jasa Pendidikan** | **2** |
| **Jasa Kesehatan** | **1** |
| **Jasa Laundry** | **1** |
| **Retail Sayur** | **1** |
| **Retail Parfum dan Herbal** | **1** |
| **Gerabah** | **1** |
| **Jasa Boga** | **1** |
| **cake and Bakery** | **3** |
| **Aneka Rempeyek dan Kue Kering** | **1** |
| **Donat** | **1** |
| **Kerupuk Ikan** | **1** |
| **Kuliner dan catering** | **1** |
| **Minuman Tradisional** | **1** |
| **Garmen, Konfeksi kaos** | **1** |
| **TOTAL** | **162** |

# IV.2.2 Permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah

# Hal umum yang banyak dihadapi oleh pelaku UMKM terutama yang berkaitan dengan aspek pembiayaan dan aspek rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disikapi sebagai masalah, tidak saja karena rendahnya akses UMKM yang *bankable* akibat terbatasnya kepemilikan legalitas usaha dan tidak memiliki jaminan atau *collateral* yang memadai untuk pengembangan usahanya, juga kurangnya kreativitas dan inovasi yang menunjukkan kualitas SDM UMKM dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini dimiliki.

# Secara lebih spesifik keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan usahanya, diakibatkan oleh berbagai hal seperti:

# Tidak dimilikinya aspek legalitas usaha yang memadai sesuai dengan tuntutan lembaga penyedia pembiayaan perbankan.

# Hambatan untuk mengakses kredit karena kurangnya informasi dan edukasi yang memadai.

# Belum berfungsinya lembaga mediasi yang mampu menjembatani optimalisasi potensi UMKM dengan lembaga keuangan.

# Persebaran UMKM yang tidak terjangkau lembaga keuangan.

# Peraturan pemerintah yang belum memihak kepada UMKM.

# Belum adanya karakteristik profil UMKM yang sesuai dengan profil usaha yang dipilih pihak lembaga keuangan.

# Masih terbatasnya program-program pendampingan bagi UMKM dalam memberi penguatan manajemen usahanya.

# Terbatasnya program-program yang mampu memberi penguatan SDM UMKM dalam mengubah mindset (pola pikir) pengelolaan usahanya, sehingga mampu mengoptimalkan potensi, kreativitas dan inovasi usahanya untuk menjadi UMKM yang unggul dan mandiri dengan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

**Dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan Kota Tegal memiliki kewenangan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat, tujuanya adalah untuk terciptanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing. Menurut Peraturan Pemerintahn Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Perdagangan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi juga dapat mengadakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya, termasuk UMKM, dengan tujuan:**

1. **Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang dan berkembang serta berkeadilan.**
2. **Mengembangkan kemampuan pelaku UMKM untuk menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.**

**Untuk mengatasi kemiskinan di Kota Tegal, Dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan Kota Tegal, melakukan berbagai hal seperti program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan peran dengan tujuan mengatasi kemiskinan di Kota Tegal. Definisi program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, Sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. (Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**